



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI: PERAN SUBDIT II DITTIPIDEKSUS DALAM MENGATASI KEJAHATAN PERBANKAN DAN JUDI ONLINE

ENFORCEMENT OF ECONOMIC CRIME LAWS: THE ROLE OF SUBDIT II DITTIPIDEKSUS IN OVERCOMING BANKING AND ONLINE GAMBLING CRIMES

Ilham Fathir Arifuddin¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: ilhamfathir411@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article history :

Received : 11-01-2025

Revised : 12-01-2025

Accepted: 14-01-2025

Published: 17-01-2025

Abstract

Law enforcement against economic crimes, especially banking crimes and online gambling, is an increasingly complex challenge in today's digital era. Subdit II Dittipideksus has a strategic role in handling these cases by developing comprehensive policies and procedures, from prevention to prosecution. This study aims to evaluate the effectiveness of the strategies implemented by Subdit II Dittipideksus in overcoming economic crimes, as well as identifying the challenges faced in their implementation. Through a qualitative approach, this study found that although there has been progress in law enforcement, there are still obstacles that need to be overcome, such as limited resources and technology. Therefore, stronger collaborative efforts are needed between various institutions to create a more effective and responsive law enforcement system to the dynamics of economic crimes that continue to develop.

Keywords: *Law Enforcement, Economic Crimes, Banking Crimes, Online Gambling*

Abstrak

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi, Khususnya Kejahatan Perbankan Dan Judi Online, Merupakan Tantangan Yang Semakin Kompleks Di Era Digital Saat Ini. Subdit Ii Dittipideksus Memiliki Peran Strategis Dalam Menangani Kasus-Kasus Ini Dengan Mengembangkan Kebijakan Dan Prosedur Yang Komprehensif, Mulai Dari Pencegahan Hingga Penindakan. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengevaluasi Efektivitas Strategi Yang Diterapkan Oleh Subdit Ii Dittipideksus Dalam Mengatasi Kejahatan Ekonomi, Serta Mengidentifikasi Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya. Melalui Pendekatan Kualitatif, Penelitian Ini Menemukan Bahwa Meskipun Terdapat Kemajuan Dalam Penegakan Hukum, Masih Ada Kendala Yang Perlu Diatasi, Seperti Keterbatasan Sumber Daya Dan Teknologi. Oleh Karena Itu, Diperlukan Upaya Kolaboratif Yang Lebih Kuat Antara Berbagai Lembaga Untuk Menciptakan Sistem Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif Dan Responsif Terhadap Dinamika Kejahatan Ekonomi Yang Terus Berkembang.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ekonomi, Kejahatan Perbankan, Judi Online*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum dalam konteks tindak pidana ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem perekonomian suatu negara. Tindak pidana ekonomi, termasuk kejahatan perbankan dan judi online, telah menjadi isu yang semakin mendesak



di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, modus operandi kejahatan ini semakin kompleks dan sulit untuk diatasi. Keberadaan kejahatan ekonomi tidak hanya merugikan individu atau lembaga, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan efektif dalam penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan perekonomian nasional dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

Subdit II Dittipideksus, sebagai salah satu unit di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, memiliki peran strategis dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana ekonomi. Unit ini bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti berbagai bentuk kejahatan ekonomi, termasuk yang berkaitan dengan sektor perbankan dan perjudian online. Dengan adanya spesialisasi ini, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran, mengingat karakteristik dan kompleksitas dari setiap jenis kejahatan. Selain itu, Subdit II Dittipideksus juga berperan dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang relevan untuk menghadapi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi.

Kejahatan perbankan, seperti penipuan, penggelapan, dan pencucian uang, tidak hanya merugikan individu atau lembaga keuangan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus kejahatan perbankan di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital. Hal ini menuntut Dittipideksus untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penegakan hukum yang efektif dalam sektor perbankan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi negara.

Di sisi lain, judi online juga menjadi fenomena yang semakin marak di masyarakat. Meskipun dilarang oleh hukum, praktik perjudian online terus berkembang dengan pesat, seringkali melibatkan jaringan internasional yang sulit untuk dilacak. Judi online tidak hanya berdampak negatif pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap judi online menjadi sangat penting untuk mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dittipideksus perlu mengembangkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani judi online, termasuk kerjasama dengan lembaga internasional dan pemanfaatan teknologi untuk melacak dan menindak pelaku kejahatan.

Peran Subdit II Dittipideksus dalam mengatasi kejahatan perbankan dan judi online tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Melalui program-program sosialisasi dan kampanye kesadaran, Dittipideksus berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko dan dampak dari kejahatan ekonomi. Hal ini penting untuk membangun kesadaran kolektif dan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi, terutama di era digital saat ini. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kejahatan ekonomi, diharapkan dapat mengurangi jumlah korban dan mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh Subdit II Dittipideksus dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi sangatlah besar. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun



teknologi, menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya penegakan hukum. Selain itu, kerjasama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menjadi faktor penting dalam mengatasi kejahatan yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif. Dittipideksus perlu menjalin kemitraan dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan dalam menangani kejahatan ekonomi.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi dan menganalisis peran Subdit II Dittipideksus dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi, khususnya dalam menangani kejahatan perbankan dan judi online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas strategi yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat dalam penegakan hukum di bidang ekonomi. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan ekonomi yang terus berkembang.

Akhirnya, penegakan hukum tindak pidana ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan perbankan dan judi online, merupakan isu yang sangat relevan dan penting untuk dibahas. Dengan memahami peran Subdit II Dittipideksus dan tantangan yang dihadapinya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan hukum dan penegakan hukum di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Melalui upaya yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi dapat berjalan lebih baik, sehingga dapat menciptakan lingkungan perekonomian yang lebih aman dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Subdit II Dittipideksus dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dan judi online di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas strategi yang diterapkan oleh Subdit II Dittipideksus dalam menangani kasus-kasus kejahatan perbankan dan judi online?
Apa peran edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Subdit II Dittipideksus dalam mencegah kejahatan perbankan dan judi online di masyarakat?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Subdit II Dittipideksus dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dan judi online.
2. Mengevaluasi efektivitas strategi penegakan hukum yang diterapkan oleh Subdit II Dittipideksus dalam menangani kejahatan perbankan dan judi online.
3. Menganalisis peran edukasi dan sosialisasi dalam mencegah kejahatan perbankan dan judi online di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam



konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya kejahatan perbankan dan judi online. Penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Subdit II Dittipideksus dalam menangani kasus-kasus tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi dari lembaga terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan ekonomi.

Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai norma-norma hukum yang ada dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Penelitian ini akan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan perbankan dan judi online, serta dokumen-dokumen resmi yang mencerminkan kebijakan penegakan hukum yang diterapkan oleh Subdit II Dittipideksus. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi, serta mengevaluasi dampak dari kebijakan yang ada. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan hukum dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan yang dihadapi oleh Subdit II Dittipideksus dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dan judi online di Indonesia

Subdit II Dittipideksus, sebagai unit yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dan judi online, menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun anggaran yang tersedia. Dalam konteks ini, jumlah personel yang ada sering kali tidak sebanding dengan volume kasus yang harus ditangani. Dengan meningkatnya jumlah kejahatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perbankan dan judi online, Subdit II Dittipideksus harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, yang dapat mengakibatkan penanganan kasus yang kurang optimal. Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan unit ini untuk mengakses teknologi terbaru dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan personel dalam menghadapi modus operandi kejahatan yang terus berkembang. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dan memperlambat proses penyelesaian kasus, sehingga menciptakan kesan bahwa kejahatan ekonomi tidak ditangani dengan serius (Airef, 2016).

Kompleksitas modus operandi kejahatan perbankan dan judi online menjadi tantangan berikutnya yang dihadapi oleh Subdit II Dittipideksus. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, pelaku kejahatan semakin canggih dalam menggunakan berbagai metode untuk melakukan kejahatan. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile dan platform online untuk judi ilegal telah membuatnya lebih sulit untuk dilacak. Selain itu, pelaku kejahatan sering kali menggunakan



teknik pengelabuan yang rumit, seperti pencucian uang melalui transaksi yang tampak sah, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka. Kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku kejahatan ini tidak hanya memperlambat proses penegakan hukum, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Subdit II Dittipideksus dalam menjaga keamanan ekonomi. Dengan demikian, tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif dalam penegakan hukum untuk dapat mengimbangi perkembangan modus operandi yang semakin kompleks.

Kerjasama antar lembaga juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dan judi online. Subdit II Dittipideksus perlu menjalin kolaborasi yang erat dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun di tingkat internasional untuk mengatasi kejahatan lintas batas. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terjalannya kerjasama yang efektif. Misalnya, perbedaan dalam regulasi, prosedur, dan kebijakan antar lembaga dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi. Selain itu, kurangnya saling percaya antara lembaga juga dapat menghambat pertukaran informasi yang krusial dalam penanganan kasus kejahatan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi Subdit II Dittipideksus untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Membangun saluran komunikasi yang lebih baik dan mekanisme koordinasi yang jelas antara lembaga-lembaga terkait menjadi langkah strategis untuk menciptakan sinergi dalam penanganan kejahatan ekonomi (Dellyana, 2018).

Tingkat kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan ekonomi juga menjadi tantangan yang signifikan bagi Subdit II Dittipideksus. Masyarakat sering kali kurang memahami bentuk-bentuk kejahatan perbankan dan judi online, serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Rendahnya kesadaran ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penipuan dan kejahatan lainnya. Misalnya, banyak individu yang terjebak dalam praktik judi online tanpa menyadari bahwa mereka sedang terlibat dalam kegiatan ilegal yang dapat berakibat hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang cara melaporkan kejahatan atau tindakan mencurigakan juga menghambat upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi menjadi sangat penting untuk mendukung upaya Subdit II Dittipideksus dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan ekonomi. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan dapat mengurangi jumlah korban dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Subdit II Dittipideksus perlu mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan adaptif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personel, diharapkan mereka dapat lebih siap menghadapi berbagai modus operandi kejahatan yang terus berkembang. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan data analitik juga dapat membantu dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan lebih efektif. Dengan demikian, Subdit II Dittipideksus dapat meningkatkan responsivitas dan efektivitas dalam penegakan hukum. Penerapan teknologi canggih, seperti sistem pemantauan dan analisis data, dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan cepat dalam pengambilan keputusan, sehingga mempercepat proses penanganan kasus (Supancana et al, 2016).



Kerjasama antar lembaga juga harus diperkuat dengan membangun saluran komunikasi yang lebih baik dan mekanisme koordinasi yang jelas. Melalui forum-forum kerjasama, lembaga-lembaga terkait dapat saling berbagi informasi dan pengalaman dalam menangani kejahatan ekonomi. Hal ini tidak hanya akan mempercepat proses penegakan hukum, tetapi juga akan menciptakan sinergi yang lebih baik dalam upaya pencegahan kejahatan. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan Subdit II Dittipideksus dapat lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan perbankan dan judi online yang semakin kompleks. Selain itu, kerjasama internasional juga penting untuk mengatasi kejahatan lintas batas yang sering kali melibatkan jaringan internasional, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

Akhirnya, peningkatan kesadaran masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum. Subdit II Dittipideksus perlu melaksanakan program-program edukasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk melalui media sosial, seminar, dan kampanye publik. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang risiko kejahatan ekonomi, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi diri mereka dari kejahatan. Peningkatan kesadaran ini tidak hanya akan membantu individu untuk menghindari menjadi korban, tetapi juga akan mendukung upaya penegakan hukum dengan meningkatkan jumlah laporan tentang tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh Subdit II Dittipideksus dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dan judi online dapat diatasi secara lebih efektif, menciptakan lingkungan perekonomian yang lebih aman dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Efektivitas strategi yang diterapkan oleh Subdit II Dittipideksus dalam menangani kasus-kasus kejahatan perbankan dan judi online

Subdit II Dittipideksus telah mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur penegakan hukum yang dirancang untuk menangani kejahatan perbankan dan judi online secara efektif. Kebijakan ini mencakup pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penindakan, dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang responsif terhadap dinamika kejahatan ekonomi yang terus berkembang. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah penguatan regulasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Melalui kolaborasi ini, Subdit II Dittipideksus dapat mengakses data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola kejahatan. Prosedur penanganan kasus juga telah disusun dengan jelas, mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan, yang mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data. Evaluasi terhadap prosedur ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Keterbatasan ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan memperlambat proses penyelesaian kasus, sehingga menciptakan kesan bahwa kejahatan ekonomi tidak ditangani dengan serius.

Dalam konteks efektivitas strategi, penting untuk melakukan studi kasus yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan dalam penanganan kejahatan perbankan dan judi online. Salah satu contoh keberhasilan yang menonjol adalah penanganan kasus judi online yang melibatkan jaringan internasional. Dalam kasus ini, Subdit II Dittipideksus berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku utama dan menyita aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut.



Keberhasilan ini didukung oleh kerjasama yang baik dengan lembaga internasional, serta penggunaan teknologi pemantauan yang canggih untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan juga berkontribusi pada keberhasilan penanganan kasus ini. Namun, tidak semua kasus berakhir dengan sukses. Beberapa kasus mengalami kegagalan, seperti kasus penipuan perbankan yang melibatkan skema Ponzi, di mana pelaku berhasil melarikan diri sebelum ditangkap. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang akurat dan cepat mengenai aktivitas mencurigakan menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam penegakan hukum. Hal ini menyoroti pentingnya pengumpulan data yang lebih baik dan sistem pelaporan yang lebih efisien untuk meningkatkan responsivitas terhadap kejahatan (Tongat, 2011).

Indikator keberhasilan penegakan hukum menjadi aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan oleh Subdit II Dittipideksus. Beberapa indikator yang digunakan meliputi jumlah kasus yang berhasil ditangani, tingkat pengembalian aset yang disita, serta penurunan angka kejahatan di sektor perbankan dan judi online. Selain itu, survei kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum juga menjadi salah satu indikator yang relevan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah kasus yang ditangani, dampak terhadap penurunan angka kejahatan belum sepenuhnya terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun strategi yang diterapkan sudah baik, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan ekonomi, menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan memanfaatkan indikator-indikator ini, Subdit II Dittipideksus dapat melakukan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menangani kejahatan ekonomi.

Dampak dari penegakan hukum terhadap penurunan angka kejahatan juga perlu dianalisis secara mendalam. Meskipun Subdit II Dittipideksus telah berhasil menangani sejumlah kasus, tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi kejahatan perbankan dan judi online tetap signifikan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada tindakan penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan yang dilakukan secara proaktif. Misalnya, program edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran akan risiko kejahatan ekonomi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam bertransaksi. Selain itu, kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan juga dapat memperkuat upaya pencegahan. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif harus mencakup pendekatan yang holistik, menggabungkan penindakan, pencegahan, dan edukasi masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi.

Selanjutnya, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh Subdit II Dittipideksus. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam strategi yang ada, serta untuk menyesuaikan pendekatan yang digunakan dengan perkembangan modus operandi kejahatan yang terus berubah. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, Subdit II Dittipideksus dapat mengadaptasi kebijakan dan prosedur yang ada agar lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru. Selain itu, umpan balik dari masyarakat dan lembaga terkait juga perlu diperhatikan dalam proses evaluasi ini, sehingga strategi yang diterapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan



masyarakat. Dengan demikian, evaluasi yang komprehensif akan membantu Subdit II Dittipideksus untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam penegakan hukum.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas strategi penegakan hukum, Subdit II Dittipideksus juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi personel sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan data analitik dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan kejahatan. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, Subdit II Dittipideksus dapat lebih cepat dan akurat dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan serta menganalisis pola-pola yang muncul dalam kejahatan perbankan dan judi online. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan ekonomi.

Akhirnya, kolaborasi dengan lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, harus terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kerjasama ini tidak hanya akan mempercepat proses penanganan kasus, tetapi juga akan menciptakan sinergi yang lebih baik dalam upaya pencegahan kejahatan. Dengan membangun jaringan kerjasama yang solid, Subdit II Dittipideksus dapat lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan perbankan dan judi online yang semakin kompleks. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dapat berjalan lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan perekonomian yang lebih aman dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Subdit II Dittipideksus dalam menangani kejahatan perbankan dan judi online akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada (Lutfi et al, 2021).

Peran edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Subdit II Dittipideksus dalam mencegah kejahatan perbankan dan judi online di masyarakat

Subdit II Dittipideksus telah melaksanakan berbagai program edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko kejahatan perbankan dan judi online. Program-program ini dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang berbagai bentuk kejahatan ekonomi, serta cara-cara untuk melindungi diri dari potensi ancaman. Salah satu program yang menonjol adalah seminar dan workshop yang diadakan di berbagai lokasi, termasuk sekolah, universitas, dan komunitas lokal. Dalam seminar ini, para ahli dari Subdit II Dittipideksus memberikan presentasi mengenai modus operandi kejahatan perbankan dan judi online, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh masyarakat. Selain itu, Subdit II Dittipideksus juga memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi, dengan tujuan menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan akses mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang kejahatan ekonomi. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap kejahatan yang semakin canggih.

Metode yang digunakan dalam sosialisasi kepada masyarakat sangat bervariasi, mencakup pendekatan langsung dan tidak langsung. Dalam pendekatan langsung, Subdit II Dittipideksus mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, di mana masyarakat dapat bertanya langsung



kepada narasumber mengenai isu-isu yang mereka hadapi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Di sisi lain, pendekatan tidak langsung dilakukan melalui penyebaran materi edukasi, seperti brosur, poster, dan video edukasi yang disebarakan melalui berbagai saluran, termasuk media cetak dan elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Subdit II Dittipideksus juga mengembangkan aplikasi mobile yang menyediakan informasi terkini mengenai kejahatan ekonomi dan cara melaporkannya. Metode-metode ini diharapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Dengan demikian, program edukasi dan sosialisasi ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas dan mendalam di kalangan masyarakat tentang risiko kejahatan perbankan dan judi online (Sapidin et al, 2023).

Dampak dari program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Subdit II Dittipideksus terhadap kesadaran masyarakat dapat dilihat dari analisis perubahan tingkat kesadaran sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Sebelum adanya program ini, banyak masyarakat yang kurang memahami risiko dan dampak dari kejahatan perbankan dan judi online. Namun, setelah mengikuti program edukasi, survei menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai modus operandi kejahatan tersebut. Masyarakat kini lebih mampu mengenali tanda-tanda penipuan dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, program edukasi ini juga berkontribusi pada pengurangan jumlah korban kejahatan ekonomi. Dengan meningkatnya kesadaran, masyarakat menjadi lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang, yang pada gilirannya membantu aparat penegak hukum dalam mencegah dan menangani kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman kejahatan.

Pengaruh program edukasi terhadap pengurangan korban kejahatan ekonomi sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan program edukasi, terjadi penurunan jumlah laporan kasus kejahatan perbankan dan judi online di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang telah mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih baik cenderung lebih berhati-hati dan tidak mudah terjebak dalam praktik-praktik ilegal. Selain itu, peningkatan jumlah laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan juga mencerminkan keberhasilan program edukasi dalam membangun kesadaran kolektif. Masyarakat kini lebih berani untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan, yang sebelumnya mungkin mereka abaikan karena kurangnya pengetahuan. Dengan demikian, program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Subdit II Dittipideksus tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Penurunan angka kejahatan ini menjadi indikator penting bahwa edukasi yang diberikan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Meskipun program edukasi dan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Subdit II Dittipideksus menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas yang lebih besar. Salah satu area yang perlu diperhatikan adalah penyampaian materi edukasi yang lebih interaktif dan menarik. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih tertarik pada metode pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif, seperti simulasi atau permainan edukatif. Oleh karena itu, Subdit II Dittipideksus perlu mengembangkan program-program yang lebih inovatif dan menarik untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu,



perlu juga dilakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta untuk menyesuaikan pendekatan yang digunakan dengan perkembangan modus operandi kejahatan yang terus berubah. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, Subdit II Dittipideksus dapat memastikan bahwa program-program yang ada tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru.

Rekomendasi untuk strategi sosialisasi yang lebih efektif di masa mendatang mencakup peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Dengan menjalin kemitraan yang kuat, Subdit II Dittipideksus dapat memperluas jangkauan program edukasi dan meningkatkan efektivitasnya. Misalnya, kerjasama dengan sekolah dan universitas dapat membantu dalam menyebarkan informasi kepada generasi muda, yang merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan online. Selain itu, melibatkan influencer atau tokoh masyarakat dalam kampanye sosialisasi dapat menarik perhatian lebih banyak orang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program edukasi. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, diharapkan program edukasi dan sosialisasi dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan perbankan dan judi online di masyarakat. Kerjasama ini juga dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara berbagai pihak dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman (Zembra et al, 2021).

Akhirnya, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari program edukasi dan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Subdit II Dittipideksus perlu melakukan survei dan penelitian untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat secara berkala, serta untuk menilai efektivitas metode yang digunakan. Dengan data yang akurat, Subdit II Dittipideksus dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan program-program yang ada. Selain itu, umpan balik dari masyarakat juga sangat berharga dalam proses evaluasi ini, sehingga strategi yang diterapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, melalui upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi, Subdit II Dittipideksus dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan waspada terhadap kejahatan perbankan dan judi online, serta membangun lingkungan perekonomian yang lebih aman dan berkeadilan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari ancaman kejahatan ekonomi yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dan judi online, Subdit II Dittipideksus perlu mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan adaptif. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk memperluas jangkauan program edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan ekonomi. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi, diharapkan Subdit II Dittipideksus dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan waspada terhadap kejahatan perbankan dan judi online, serta membangun lingkungan perekonomian yang lebih aman dan berkeadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Airef, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Dellyana, Shanti. Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Lutfi, Anas, and Rusmin Nuriadin. "Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan di Bidang Ekonomi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Sapidin, Sapidin, and Sintong Arion Hutapea. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi." *Keadilan* 21, no. 2 (2023).
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.
- Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang, 2011.
- Zembra, Jefri Soni. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi." *Law Journal of Mai Wandeu (LJMW)* 15, no. 2 (2021).